



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Kuliah Umum di Universitas Airlangga

Surabaya, 29 Januari 2020





OUTLINE



1. Tantangan Perekonomian Nasional	3 - 5
2. Kinerja Ekonomi Indonesia	6 - 9
3. Asumsi dan Outlook Ekonomi Indonesia 2020	10
4. Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional Inklusif	
- Pengembangan SDM	12 - 14
- Pembangunan Infrastruktur	15
- Penyederhanaan Regulasi : Omnibus Law	16 - 18
- Bidang Usaha Prioritas (DNI)	19
- Insentif Fiskal, Jaminan, Bansos & Pembiayaan UMKM	20 - 24
- Meningkatkan Pengembangan Industri Orientasi Ekspor	25 - 26
- Meningkatkan Perdagangan Internasional	27 - 28
- Transformasi Ekonomi 2020-2024	29

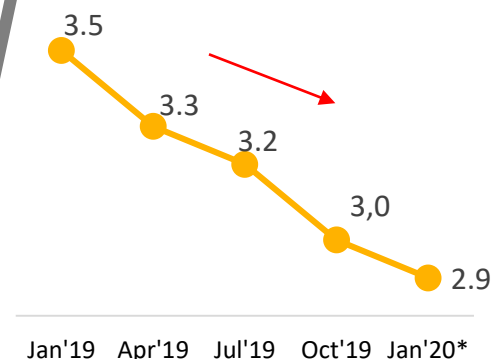


Perekonomian Global Dibayangi Ketidakpastian & Berada Pada Tren Melambat

- Ekonomi dunia mengalami perlambatan baik di negara maju maupun berkembang.
- Perlambatan ini ditransmisikan hingga ke perekonomian nasional meski minimal.



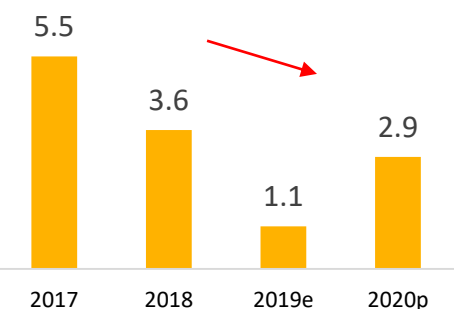
Proyeksi Ekonomi Global



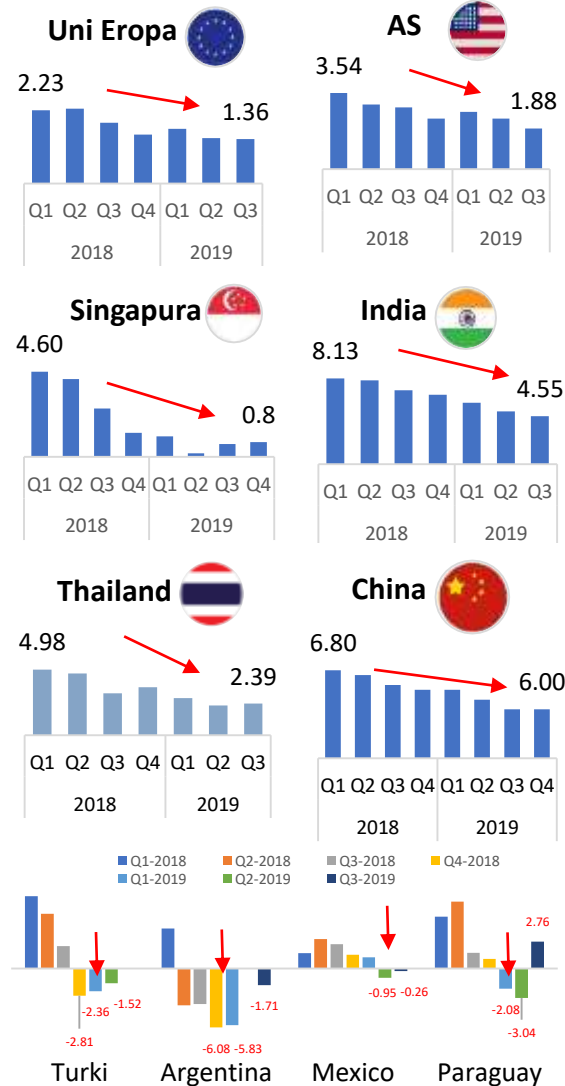
Sumber Ketidakpastian

- Perang dagang China - AS
- Ketegangan geopolitik
- Pelemahan aktivitas manufaktur
- Fluktuasi harga komoditas

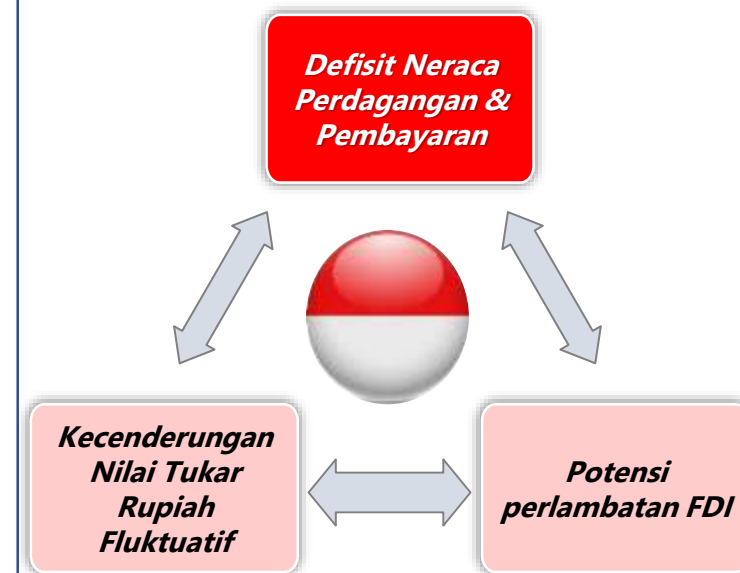
Volume Perdagangan



Perlambatan Ekonomi



TRANSMISI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP EKONOMI NASIONAL





Ketidakpastian Global Juga Didorong oleh Meningkatnya Resiko Geopolitik

Wabah Virus Corona dan Ketegangan geopolitik dunia berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di tahun 2020

1



Virus Corona di China

- Sedikitnya 106 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 4 ribu kasus virus sedang ditangani di China. (CGTN)
- Berpotensi mempengaruhi industri pariwisata dan konsumsi selama libur tahun baru China. **Berdasarkan data 2019, sektor jasa menyumbang 59,4% dari total PDB China.**
- **Berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global.**

2



Ketegangan di Timur Tengah (AS vs Iran)

- AS menetapkan Garda Revolusi Islam Iran sbg organisasi teroris.
- AS menuduh Iran menyerang beberapa kapal tanker minyak.
- Iran menembak jatuh drone AS di Selat Hormuz
- Iran menyita tanker Inggris Stena Impero di lepas pantainya.
- Serangan fasilitas kilang minyak Saudi Aramco September 2019
- **Pembunuhan Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, memicu ketegangan baru.**

3



Brexit

- **Parlemen Inggris sepakat untuk mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan pada 31 Januari 2020.**
- Seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan anggotanya (masa transisi) berakhir pada Desember 2020.

4



Ketegangan Politik Jepang-Korea Selatan

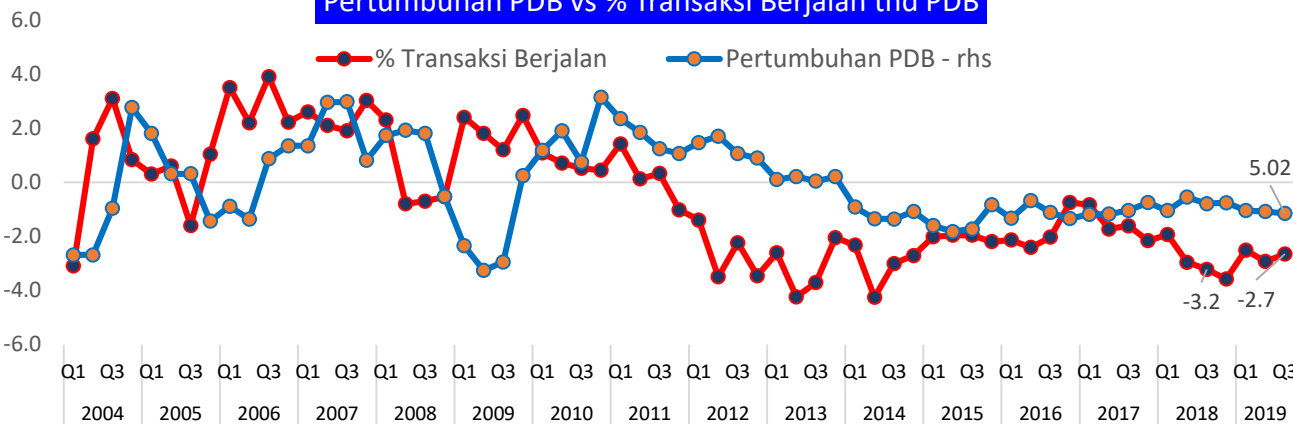
- Jepang membatasi ekspor 3 bahan kimia pembuat semikonduktor ke Korsel.
- **Jepang menghapus Korsel dari daftar mitra dagang terpercaya (white list).**
- Korsel melakukan aksi boikot produk Jepang.
- Korsel akan memperpanjang *General Security of Military Agreement (GSOMIA)* dengan Jepang.



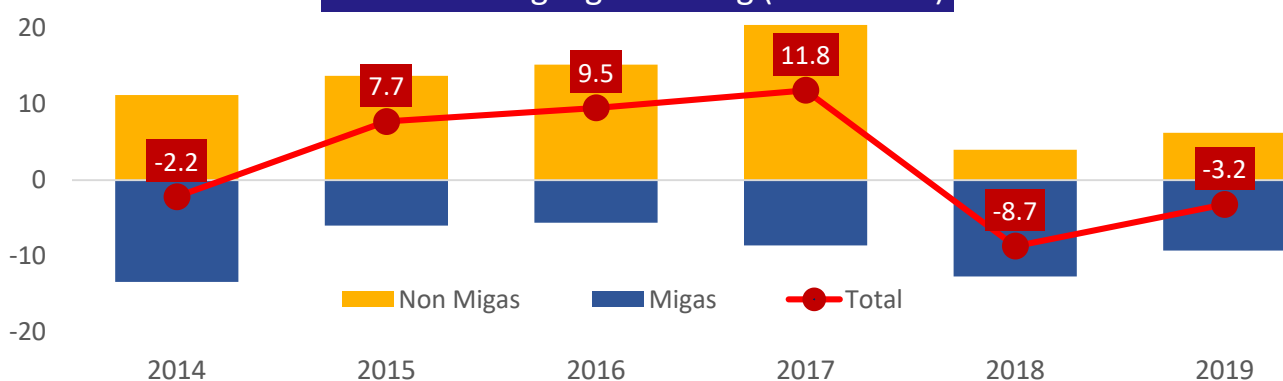
Tantangan: Defisit Neraca Pembayaran dan Perdagangan Terus Membayangi

- Defisit neraca pembayaran terjadi akibat surplus transaksi modal dan keuangan tidak mampu menutup defisit transaksi perdagangan.
- Selama 2019, defisit neraca perdagangan mencapai USD 3,2 Milyar.
- Kinerja ekspor menurun di 2019 seiring perlambatan ekonomi global dan meningkatnya resiko geopolitik.

Pertumbuhan PDB vs % Transaksi Berjalan thd PDB



Neraca Perdagangan Barang (Miliar USD)



20 Komoditas Ekspor Utama Tahun 2019

KOMODITAS	2018 (Miliar USD)	2019 (Miliar USD)	Selisih (Miliar USD)	%YOY	%Share
Bahan bakar mineral	24.61	22.22	-2,39	-9.70	14.34
Lemak dan minyak hewan/nabati	20.35	17.61	-2,74	-13.5	11.36
Mesin dan perlengkapan elektrik	8.85	8.54	-0,31	-3.5	5.51
Kendaraan dan bagiannya	7.55	8.16	0,61	8.1	5.27
Besi dan baja	5.76	7.41	1,65	28.6	4.78
Logam mulia, perhiasan/permata	5.60	6.62	1,02	18.2	4.27
Karet dan barang dari karet	6.38	6.02	-0,36	-5.6	3.89
Mesin dan peralatan mekanis	5.87	5.43	-0,44	-7.5	3.50
Pakaian dan aksesorinya	4.50	4.48	-0,02	-0.4	2.89
Alas kaki	5.11	4.41	-0,7	-13.7	2.85
Kertas, karton dan barang daripadanya	4.48	4.37	-0,11	-2.5	2.82
Berbagai produk kimia	4.92	4.06	-0,86	-17.5	2.62
Kayu dan barang dari kayu	4.43	3.84	-0,59	-13.3	2.48
Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	4.07	3.76	-0,31	-7.6	2.43
Ikan dan udang	3.22	3.27	0,05	1.6	2.11
Bijih, terak, dan abu logam	5.25	3.13	-2,12	-40.4	2.02
Pulp dari kayu	2.65	2.78	0,13	4.9	1.80
Bahan kimia organik	2.96	2.71	-0,25	-8.4	1.75
Plastik dan barang dari plastik	2.59	2.45	-0,14	-5.4	1.58
Serat stapel buatan	2.18	2.27	-2,39	4.1	1.46
Total 20 Komoditas Ekspor	131,33	123,54	-7,79	-5,9%	79,73

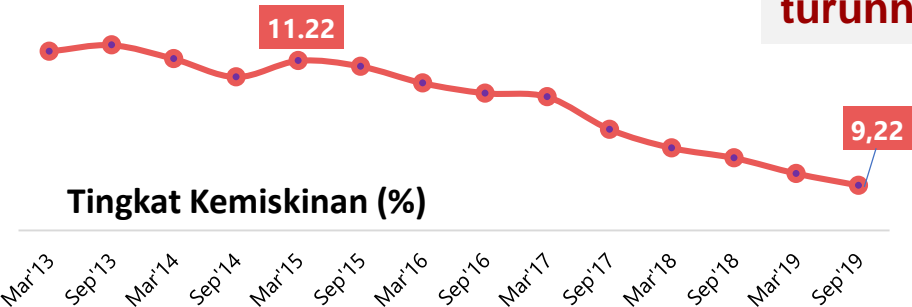


Meski Demikian, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Masih Terjaga

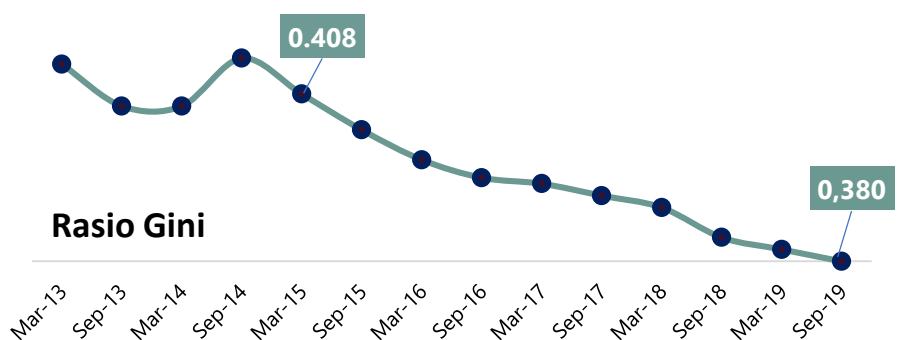
INDIKATOR SOSIAL (YoY)

Ditengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5 % dengan kualitas yang baik: inflasi yang rendah dan stabil, turunnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi (rasio gini).

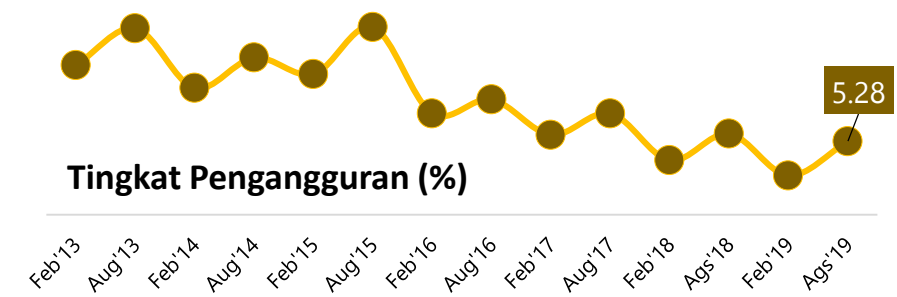
Tingkat Kemiskinan (%)



Rasio Gini



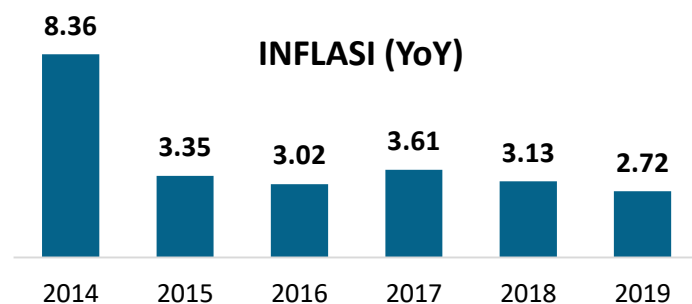
Tingkat Pengangguran (%)



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (YoY %)



INFLASI (YoY)



Dalam persentase

Negara	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019
China	6,40	6,20	6,00
Indonesia	5,07	5,05	5,02
India	5,83	5,01	4,55

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2019 telah berada di peringkat kedua dibawah China diantara negara-negara G20



Kualitas Pertumbuhan Didukung oleh Persepsi Iklim Investasi yang Membaik

Penilaian Lembaga Rating



April 2019, Rating Affirmed at **BBB/Stable**



May 2019, Rating Upgraded at **BBB/Stable**



April 2018, Rating Upgraded at **Baa2/Stable**



April 2019, Rating Affirmed at **BBB/Positive**, Outlook Revised to Positive



March 2019, Rating Affirmed at **BBB/Stable**

日本格付研究所

Sumber: IRU, Bank Indonesia

Global Competitiveness Indeks (GCI) Ranking

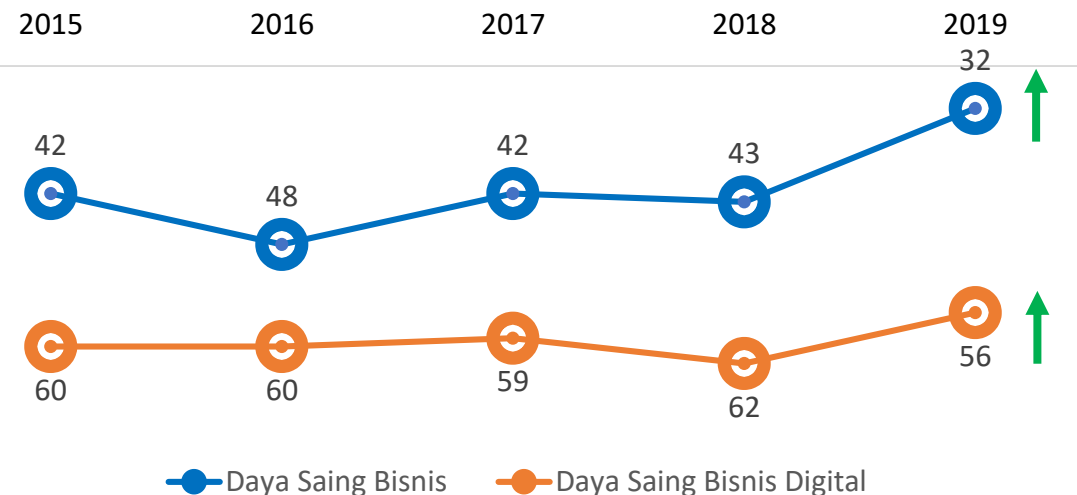
2019			Diff. From 2018	
Rank	Country	Score	Rank	Score
1	Singapore	84.8	+1	+1.3
27	Malaysia	74.6	-2	+0.2
40	Thailand	68.1	-2	+0.6
50	Indonesia	64.6	-5	-0.3
64	The Philippines	61.9	-8	-0.3
67	Vietnam	61.5	+10	+3.5

Source: GCI 2018, World Economic Forum

Perbaikan Nilai Indonesia

- ✓ *Institution*
- ✓ *Infrastructure*
- ✓ *Macroeconomic Stability*
- ✓ *Financial System*
- ✓ *Market Size*
- ✓ *Business Dynamism*
- ✓ *Innovation capability*

Peringkat Daya Saing Perekonomian



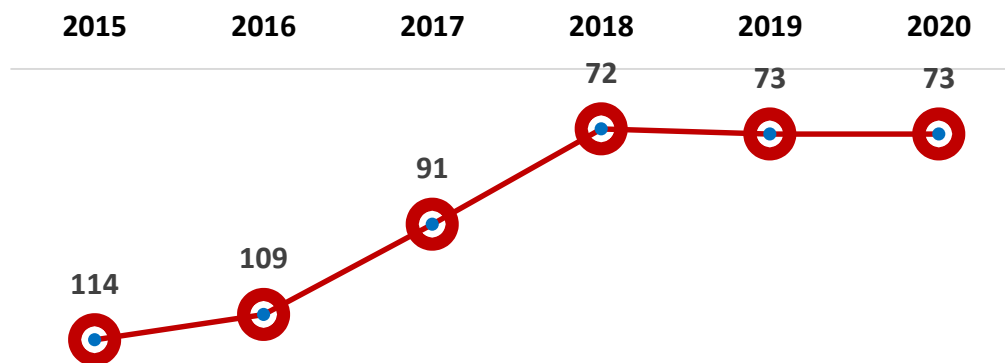
Daya Saing Bisnis				Daya Saing Bisnis Digital			
2018	2019	Negara		2018	2019	Negara	
13	14	-1	Cina	30	22	+12	China
22	22	-	Malaysia	27	26	+1	Malaysia
44	43	+1	India	48	44	+4	India
50	46	+4	Filipina	56	55	+1	Filipina
43	32	+11	Indonesia	62	56	+6	Indonesia

Sumber: IMD World Competitiveness Center



- Posisi Indonesia pada laporan Ease of Doing Business (EODB) di 2020 berada di peringkat #73 dari 190 negara
- Reformasi di 5 indikator berkontribusi pada kenaikan skor sebesar 1,64 (dari 67,96 menjadi 69,6)

PERINGKAT EODB INDONESIA



Laporan Doing Business 2020 mencatat Indonesia berhasil menyelenggarakan reformasi di 5 dari 10 indikator

- 1) Starting a Business
- 2) Getting Electricity
- 3) Paying Taxes
- 4) Enforcing Contracts
- 5) Trading Across Borders

PERINGKAT INDIKATOR EODB 2019/2020

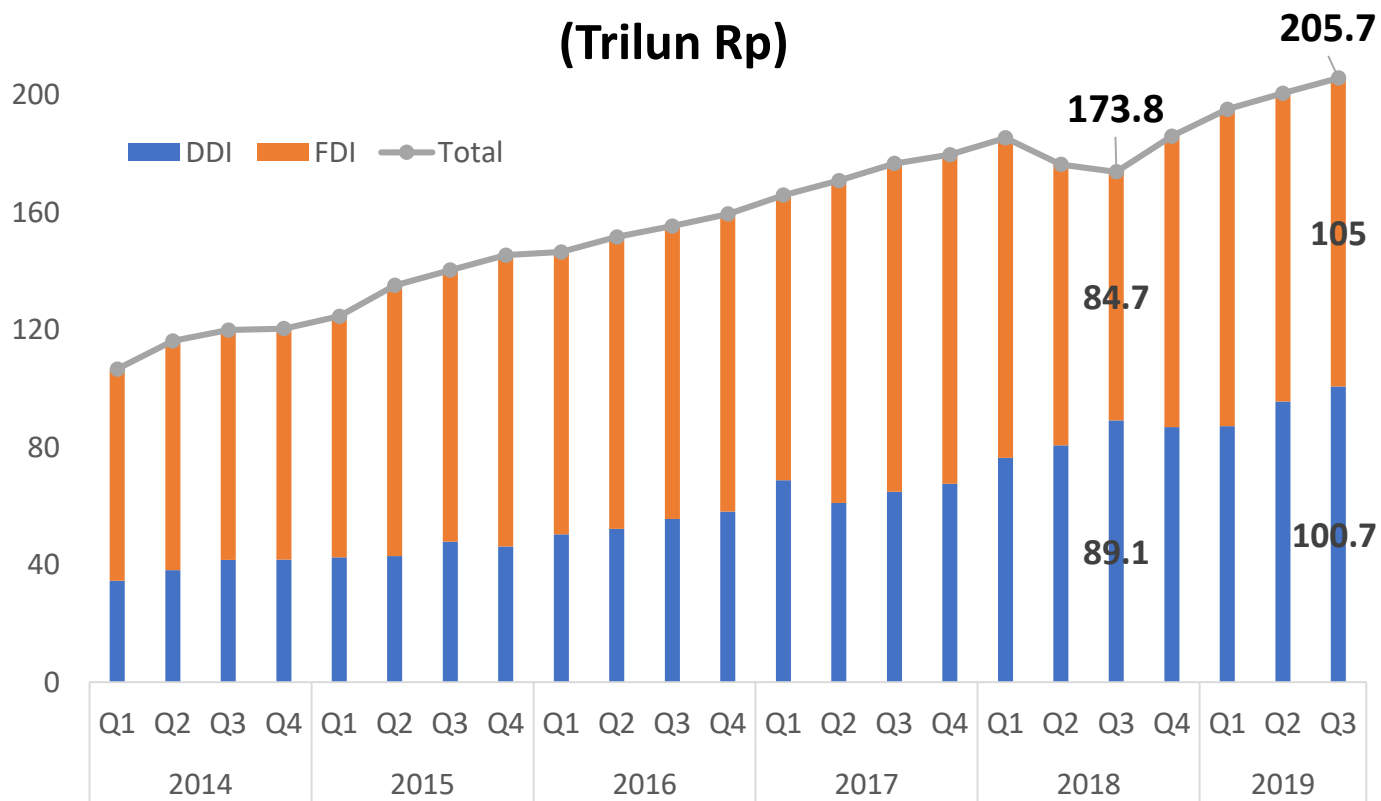
EODB Indicators	DB 2020 Rank	DB 2019 Rank	Change	DB 2020 Score	DB 2019 Score	Change
Starting a Business	140	134	-6	81,2	79,4	+1,8
Dealing with Construction Permits	110	112	+2	66,8	65,9	+0,9
Getting Electricity	33	33	0	87,3	86,4	+0,9
Registering Property	106	100	-6	60	60,1	-0,1
Getting Credit	48	44	-4	70	70	0
Protecting Minority Investors	37	51	+14	70	70	0
Paying Taxes	81	112	+31	75,8	68,4	+7,4
Trading across Borders	116	116	0	67,5	66,5	+1,0
Enforcing Contracts	139	146	+7	49,1	47,2	+1,9
Resolving Insolvency	38	36	-2	68,1	67,9	+0,2
TOTAL	73	73	0	69,6	67,96	+1,64

Negara	EODB 2020	EODB 2019	Perubahan Rank	Area Reformasi
Singapura	2	2	0	1
Malaysia	12	15	+3	1
Thailand	21	27	+6	1
Brunei	66	55	-11	2
Vietnam	70	71	-1	2
Indonesia	73	73	0	5
Filipina	95	124	+29	3
Kamboja	144	138	-6	-
Laos	154	154	0	2
Myanmar	165	171	+6	5
India	63	77	+14	4
China	31	46	+15	8



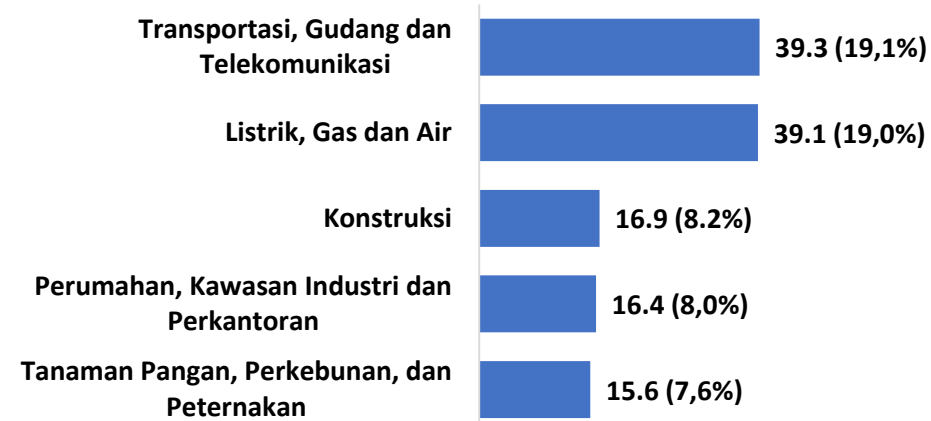
- Realisasi investasi pada Q3- 2019 mencapai Rp 205,7 triliun, meningkat sebesar 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
- Realisasi PMDN mencapai Rp100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi PMA mencapai Rp105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
- Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN dan 103.106 orang pada proyek PMA.

Investasi PMA + PMDN (Triliun Rp)

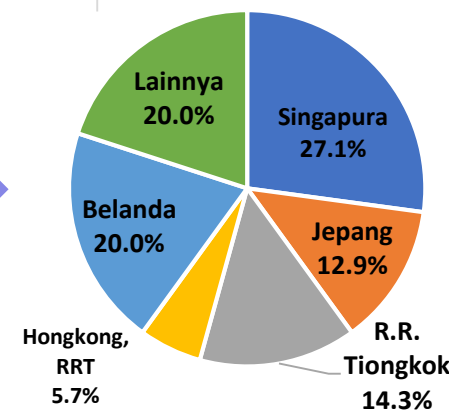


Sumber: BKPM, 2019

Realisasi Investasi Berdasar 5 Sektor Usaha Terbesar (Rp Triliun)



Realisasi PMA Berdasar Negara (%)





Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2020, **pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3 %**, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM dan implementasi kebijakan untuk **penguatan perekonomian Indonesia**.



OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2020

Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi utama

Investasi menjadi prasyarat penting untuk mencapai percepatan pertumbuhan

INFLASI 2020 tetap terkendali pada level rendah dan stabil

Sektor eksternal masih akan dipengaruhi oleh sentimen **KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL**

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL INKLUSIF





7 Visi – Misi Presiden

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

5 Arahkan Presiden

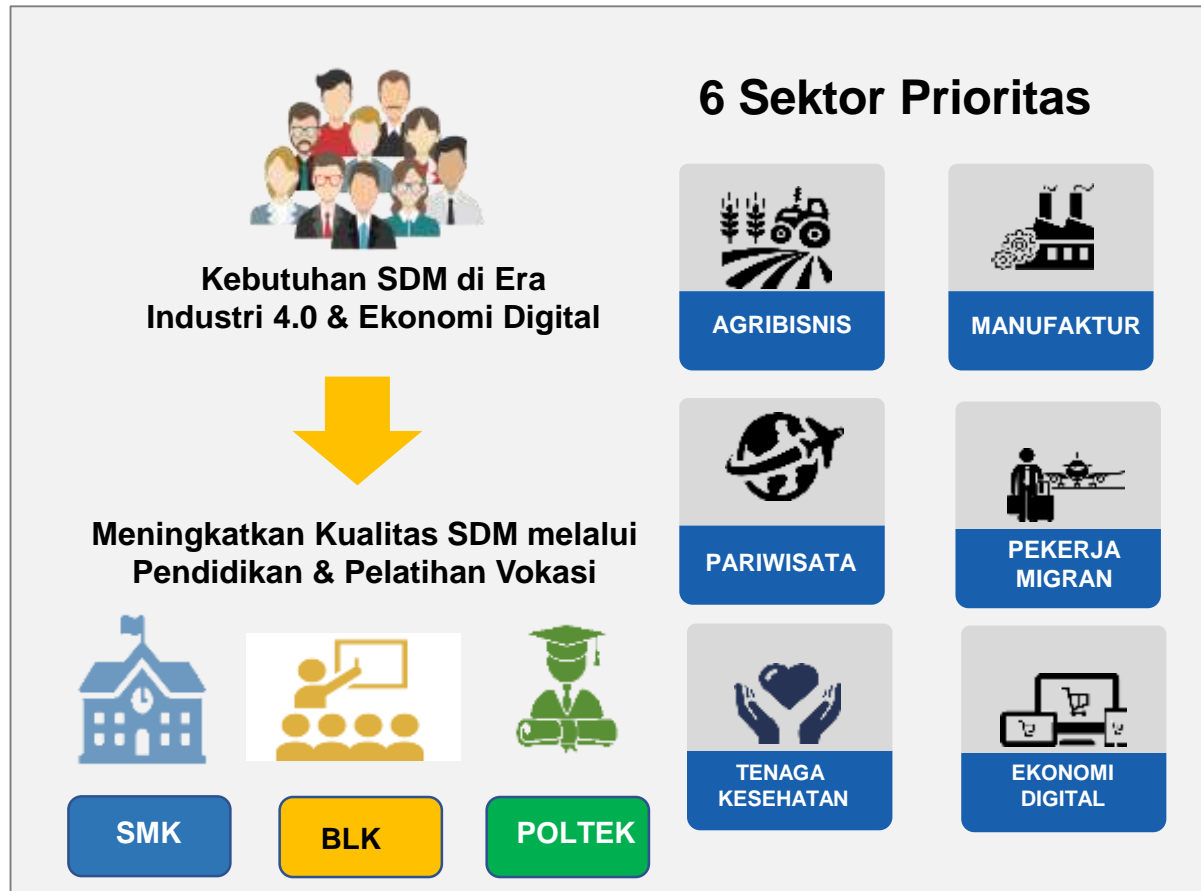
- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan RPJMN

- | | |
|--|---|
| | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas |
| | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |
| | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |
| | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
| | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |



Membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri 4.0 melalui 5 strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, terutama untuk sektor-sektor prioritas.



Keterlibatan industri sangat penting dalam perbaikan vokasi, untuk itu Pemerintah memberikan insentif bagi industri yang berperan aktif dalam mengembangkan vokasi, antara lain dengan memberikan *super tax deduction* sebesar 200%.

Pemerintah memperkenalkan **kartu Prakerja** dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia



“Program Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh aktif dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.”

Target : “2 juta peserta pada tahun 2020”

Manfaat

- 1 Pelatihan Vokasi
- 2 Sertifikasi Kompetensi
- 3 Insentif

- Skilling,
- Up-skilling
- Re-skilling

Kriteria Penerima Kartu

- 1 Warga Negara Indonesia
- 2 Berusia 18 tahun ke atas
- 3 Tidak sedang mengikuti pendidikan formal



Sistem

“Sistem terintegrasi dan berbasis digital, mudah bagi Pengguna, terkontrol dan akuntabel.”



Mendorong Peran DUDI dalam kegiatan Pengembangan SDM Indonesia melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi

INSENTIF FISKAL UNTUK MENDORONG DAYA SAING *SUPER DEDUCTION 200% UNTUK VOKASI*

KONSTRUKSI PENGATURAN

PP 45/2019

Mengatur:

- Jenis Fasilitas
- Amanah Pengaturan lebih lanjut dengan PMK

PMK Nomor 128 /PMK.010/2019 tentang pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan vokasi

Mengatur tentang :

- 01 Batasan besaran pengurangan penghasilan bruto
- 02 Cakupan lembaga pendidikan dan peserta kegiatan vokasi
- 03 Jenis biaya yang dapat diberikan insentif
- 04 Jenis kompetensi yang mendapat insentif
- 05 Tata cara pengajuan insentif
- 06 Tata cara pelaporan insentif

POKOK-POKOK PENGATURAN PMK NOMOR 128 /PMK.010/2019

Subjek Penerima

WP badan dalam negeri yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu.

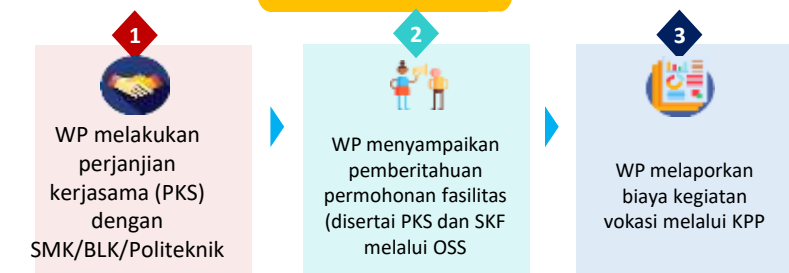
Pemagangan	Praktik Kerja	Pembelajaran
Jenis biaya yang diberi fasilitas		
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Fisik khusus (workshop dan sejenisnya) • Honor peserta (berasal dari lembaga vokasi) • Honor/Gaji Instruktur/pengajar • Barang dan Bahan • Sertifikasi 		<ul style="list-style-type: none"> • Honor/Gaji Instruktur/pengajar • Barang dan Bahan • Sertifikasi

Bentuk Insentif

Pengurangan pajak penghasilan bruto paling tinggi 200%, terdiri dari:

- 100% biaya riil kegiatan vokasi; dan
- Tambahan paling tinggi 100% dari biaya riil, sepanjang tidak menyebabkan rugi fiskal. (jika menyebabkan rugi fiskal, tambahan hanya diberikan sebesar jumlah yang menyebabkan penghasilan kena pajak nihil).

Mekanisme





PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

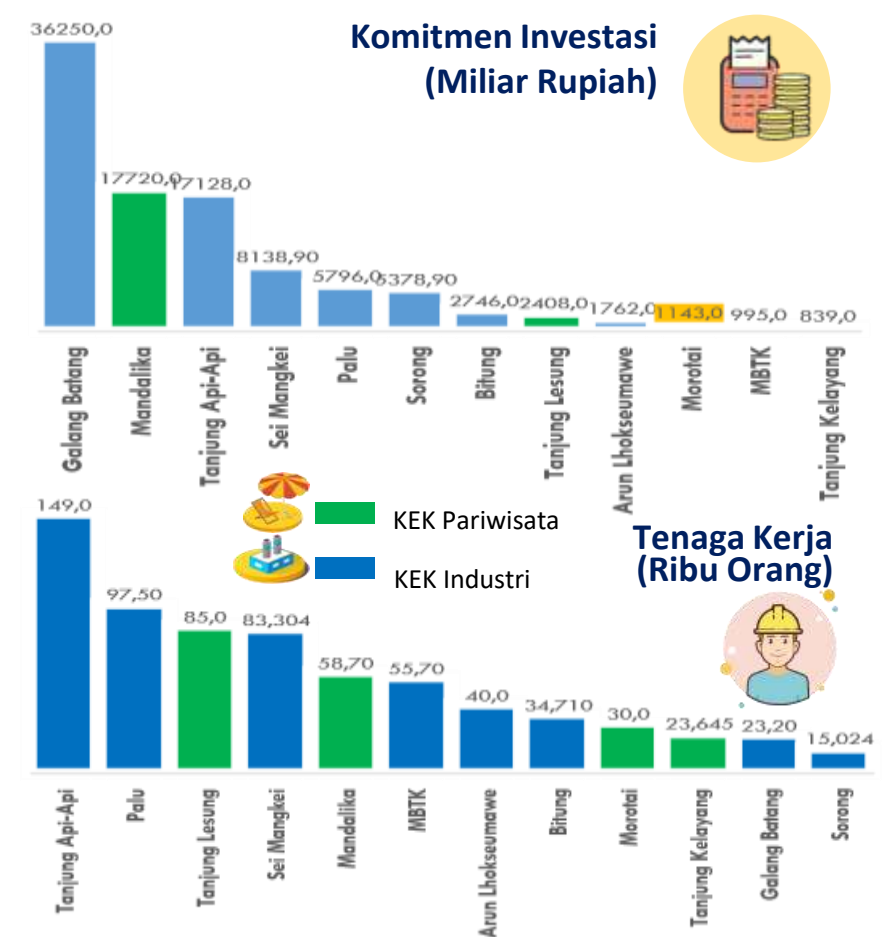
Pemerintah telah menyusun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan total nilai investasi mencapai Rp4.183 triliun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Selesai 2016	Selesai 2017	Selesai 2018	Selesai 2019
<p>20 Proyek (Rp 33,3 T)</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 Bandara 1 Jalan Tol 6 Bendungan 1 Pelabuhan 1 Jalur Pipa Gas 4 PLBN 	<p>10 Proyek (Rp 61,4 T)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Jalan Tol 1 Jalan Akses 1 Bandara 1 Fasilitas Gas 3 PLBN 1 Bendungan 1 Saluran Irigasi 	<p>32 Proyek (Rp 207,4 T)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kereta Api 4 Bendungan 1 Irigasi 10 Jalan Tol 5 KEK 1 Bandara 4 Kawasan Industri 4 Smelter 1 Sentra Kelautan Perikanan 	<p>30 Proyek (Rp 165,3 T)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Bandara 9 Jalan 6 Kawasan Industri 2 Smelter 2 Rel kereta 1 Pelabuhan 4 Bendungan 2 Teknologi

- Secara total, ada 92 Proyek Strategis Nasional yang selesai pada 2016 - 2019 dengan nilai investasi Rp 467,4T
- Pembangunan infrastruktur secara merata bermanfaat besar menstimulasi pertumbuhan dan distribusi ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing negara.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menciptakan pusat-pusat penggerak perekonomian baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen Investasi yang telah masuk senilai Rp 104 triliun dan menciptakan tenaga kerja hingga 10.700 orang.

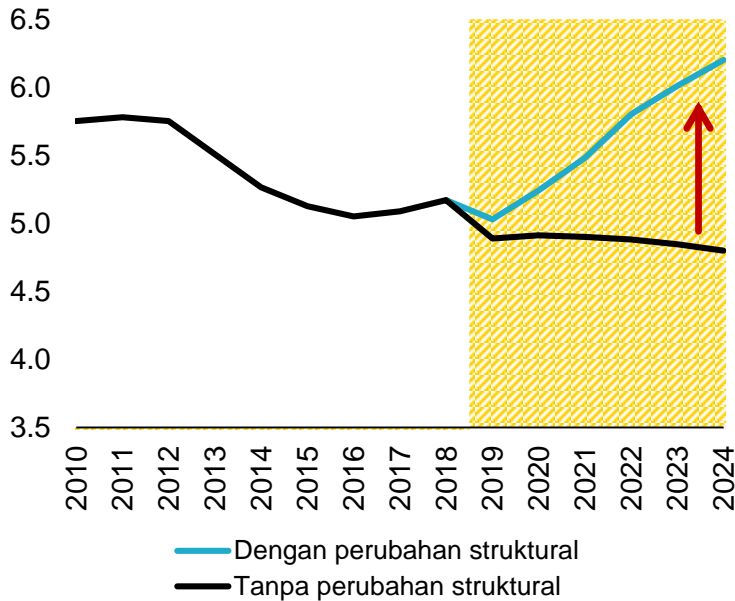


Sumber: Sekretariat Dewan Nasional KEK



Latar Belakang : Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang saling disharmoni menjadi masalah regulasi.

Potensi Pertumbuhan PDB Indonesia
 (dalam %)



Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan menurun – hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang melambat dan stok kapital yang tidak berkembang.

INDONESIA SAAT INI

- Tumpang tindih regulasi dan inefisiensi birokrasi adalah faktor paling bermasalah dalam berbisnis
- Masih terdapat 7 juta orang pengangguran; 58% pekerja bekerja secara informal
- Efektivitas investasi Indonesia terendah di ASEAN-5



Hambatan: regulasi & institusi

Keduanya merupakan hambatan utama untuk Indonesia bertumbuh berdasarkan hasil diagnostik pertumbuhan



Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan

- 1 Menghilangkan tumpang tindih antar PUU
- 2 Efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU
- 3 Menghilangkan ego sektoral



Arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia, Pemerintah mengajukan **2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU)** kepada DPR :

1. **RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja**
2. **RUU Omnibus Law Perpajakan**



Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster

- 1) Penyederhanaan Perizinan,
- 2) Persyaratan Investasi,
- 3) Ketenagakerjaan,
- 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M,
- 5) Kemudahan Berusaha,
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi,
- 7) Administrasi Pemerintahan,
- 8) Pengenaan Sanksi,
- 9) Pengadaan Lahan,
- 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
- 11) Kawasan Ekonomi



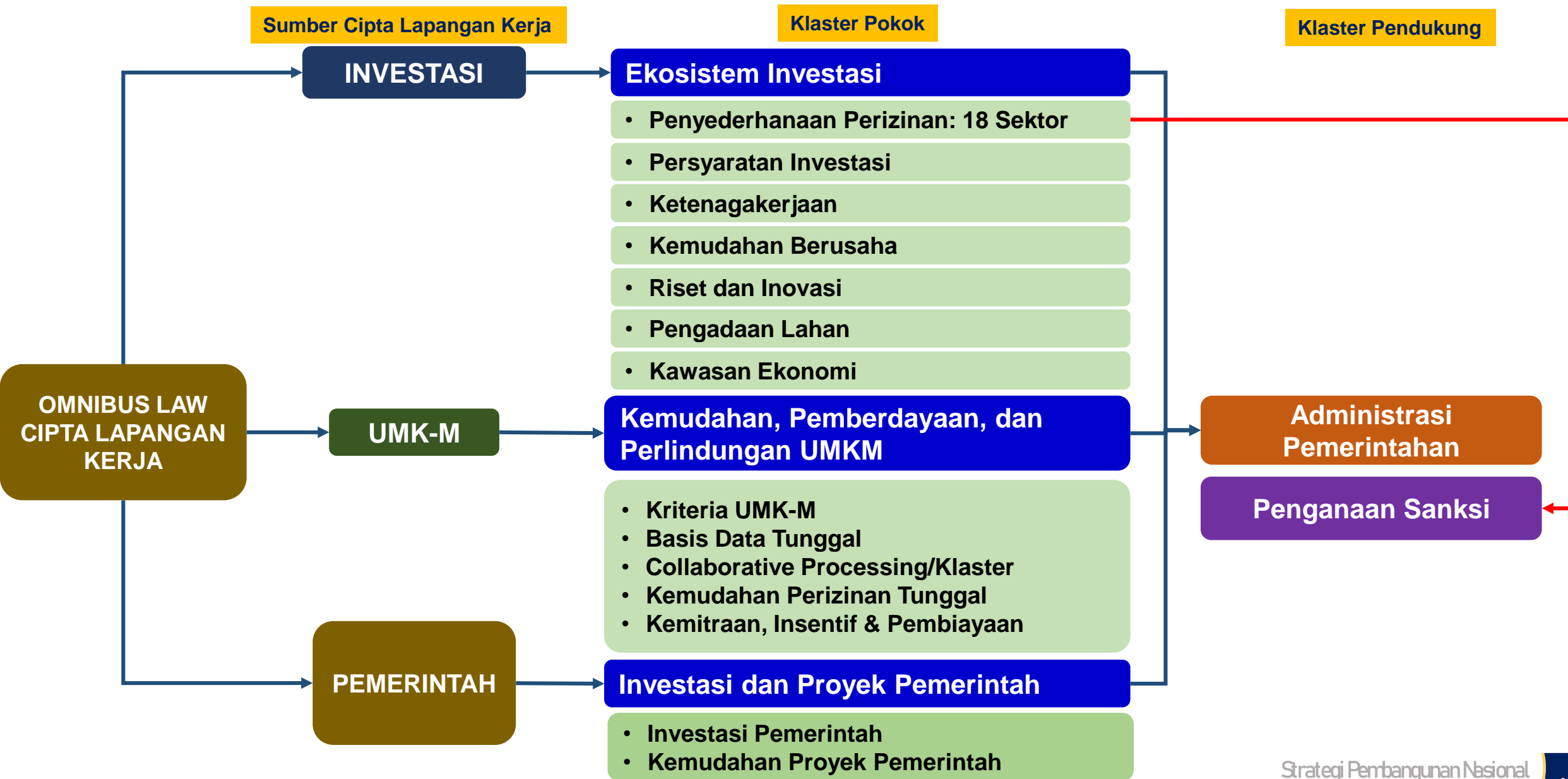
Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar

- 1) Pendanaan Investasi
- 2) Sistem Teritori
- 3) Subjek Pajak Orang Pribadi
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak
- 5) Keadilan Iklim Berusaha
- 6) Fasilitas

Telah teridentifikasi **79 Undang-Undang dan 1.239 pasal** yang akan disederhanakan melalui metode Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja









ALUR PENGATURAN OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA





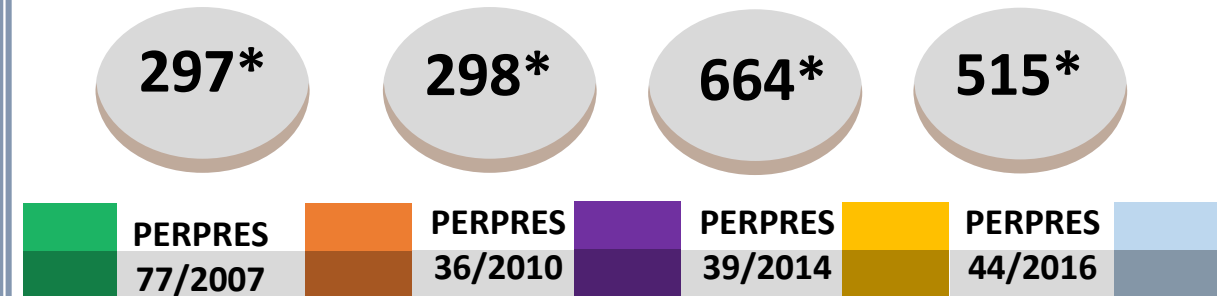
Saat ini pemerintah (melalui Menko Perekonomian) sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

- Investasi di Indonesia sangat tertutup dibandingkan negara- negara ASEAN
- Jumlah bidang usaha yang tertutup maupun bidang usaha terbuka dengan persyaratan – terbanyak diantara negara ASEAN

	 Indonesia	 Singapura	 Malaysia	 Thailand	 Filipina	 Vietnam
TERTUTUP	20	0	0	0	1	6
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN	495	4	11	43	33	0
TOTAL*)	515	4	11	43	34	6

*) Satuan : Bidang Usaha - Sumber data BKPM

Hingga 2014, jumlah bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) terus bertambah. Pada 2016, Pemerintah mulai merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam DNI .

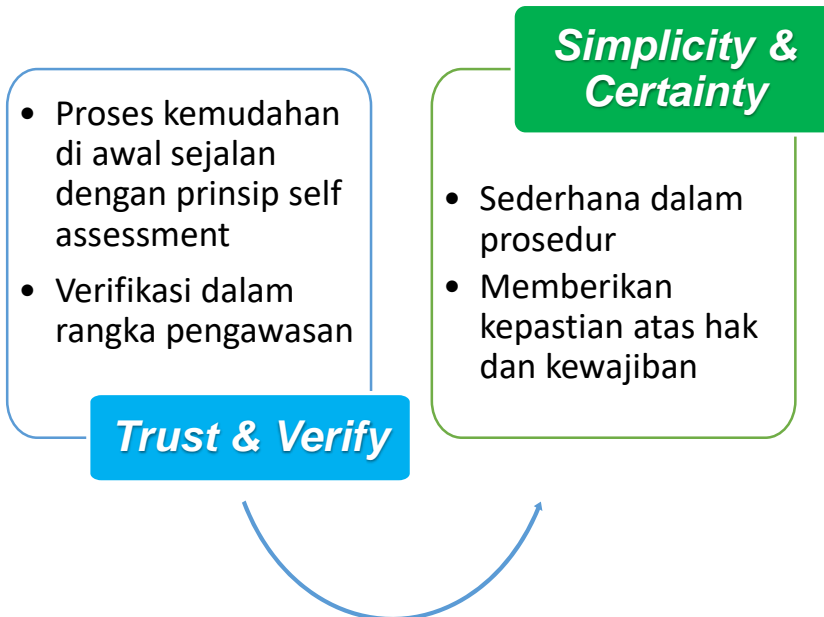


*) Merupakan Jumlah dari bidang usaha tertutup, dicadangkan untuk UMKM dan Kemitraan serta bidang usaha terbuka dengan persyaratan



- Guna mendorong masuknya investasi, terciptanya industri pioneer, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal.
- Harapannya defisit CAD bisa ditekan, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

PARADIGMA PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN



TAX HOLIDAY

- Investasi Industri pionir:
 - memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi,
 - memperkenalkan teknologi baru,
 - memiliki nilai strategis bagi perekonomian

- Fasilitas pengurangan PPh Badan:
 - sebesar 100% (untuk investasi minimal Rp500 miliar)
 - sebesar 50% (untuk investasi minimal Rp100 miliar)

SUPER DEDUCTION VOKASI & LITBANG

Super Deduction Vokasi

- Mengikutsertakan industri dalam kegiatan vokasi untuk memberikan pengetahuan dan mendorong *transfer of knowledge*
- Pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% atas biaya dalam rangka kegiatan penyediaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran

Super Deduction Litbang

- Meningkatkan peran industri dalam menumbuhkan inovasi serta pemanfaatan teknologi terkini dalam proses produksi
- Pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% atas biaya litbang yang dilakukan di Indonesia

TAX ALLOWANCE

- Investasi pada:
 - sektor prioritas dengan kriteria memiliki investasi tinggi
 - untuk ekspor,
 - menyerap tenaga kerja tinggi
 - menggunakan TKDN tinggi

- Fasilitas:
 - berupa investment allowance sebesar 30%,
 - penyusutan dan amortisasi dipercepat PPh dividen 10%
 - tambahan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun

INVESTMENT ALLOWANCE

- Dukungan Pemerintah terhadap program penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja
- Fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah investasi untuk industri padat karya tertentu



Sampai dengan 31 Desember 2019 telah disetujui tax holiday dari 60 wajib pajak dengan nilai rencana investasi sebesar Rp1.045 triliun

Keterangan	PMK 150/2018
WP yang dapat diberikan T/H	Penanaman modal baru pada Industri Pionir dengan nilai investasi minimal Rp 500 miliar <ul style="list-style-type: none"> 18 sektor 169 KBLI
Persentase pengurangan T/H	<ul style="list-style-type: none"> 100% (untuk <i>Tax Holiday</i>) 50% (untuk <i>Mini Tax Holiday</i>)
Jangka Waktu	Tax Holiday: <ul style="list-style-type: none"> Investasi Rp500 M s.d. < Rp1 T → 5 tahun Investasi Rp1 T s.d. < Rp5 T → 7 tahun Investasi Rp5 T s.d. < Rp15 T → 10 tahun Investasi Rp15 T s.d < Rp30 T → 15 tahun Investasi minimal Rp30 T → 20 tahun Mini tax holiday: <ul style="list-style-type: none"> Investasi Rp100 M s.d. < Rp500 M
Masa Transisi	<ul style="list-style-type: none"> 50% selama 2 tahun (untuk <i>tax holiday</i>) 25% selama 2 tahun (<i>mini tax holiday</i>)
Proses	Otomasi, diputuskan dengan Sistem OSS

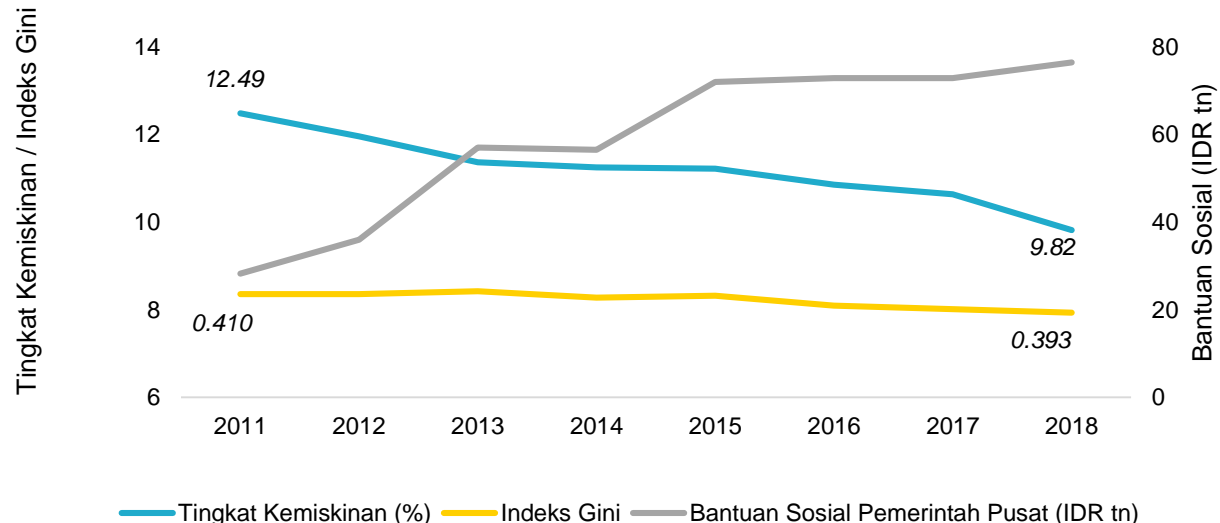
18 Sektor Berdasar PMK No.150 Tahun 2018
a. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) b. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi c. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara d. Industri kimia dasar anorganik e. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan f. Industri bahan baku farmasi g. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi h. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display i. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin j. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur k. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik l. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor m. Industri pembuatan komponen utama kapal n. Industri pembuatan komponen utama kereta api o. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara p. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya q. Infrastruktur ekonomi r. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu

Capaian: 31 Desember 2019

	20 Propinsi		60 Wajib Pajak		Rencana Investasi Rp 1.045 Trilliun
	15 Negara		Penyerapan Tenaga Kerja 45.723		



- Perluasan program **jaminan dan bantuan sosial** merupakan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- Melalui dukungan **jaminan dan bantuan sosial**, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga Pekerja



Masa kehamilan dan usia dini
(0-5 tahun)



Muda
(6-12 tahun)



Dewasa muda
(13-18 tahun)



Menengah dan kerja
(19-64 tahun)



Tua
(>65 tahun)

<ul style="list-style-type: none"> • PKH (pencegahan stunting) 	<ul style="list-style-type: none"> • PKH • PIP SD 	<ul style="list-style-type: none"> • PKH • PIP SMP-SMA • KUR • KUBE • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidik Misi • PIP Kuliah • JKK & JKM • JP & JHT • KUR & KUBE • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • JP & JHT • ASLUT
---	---	--	--	---

Kartu Pra-Kerja

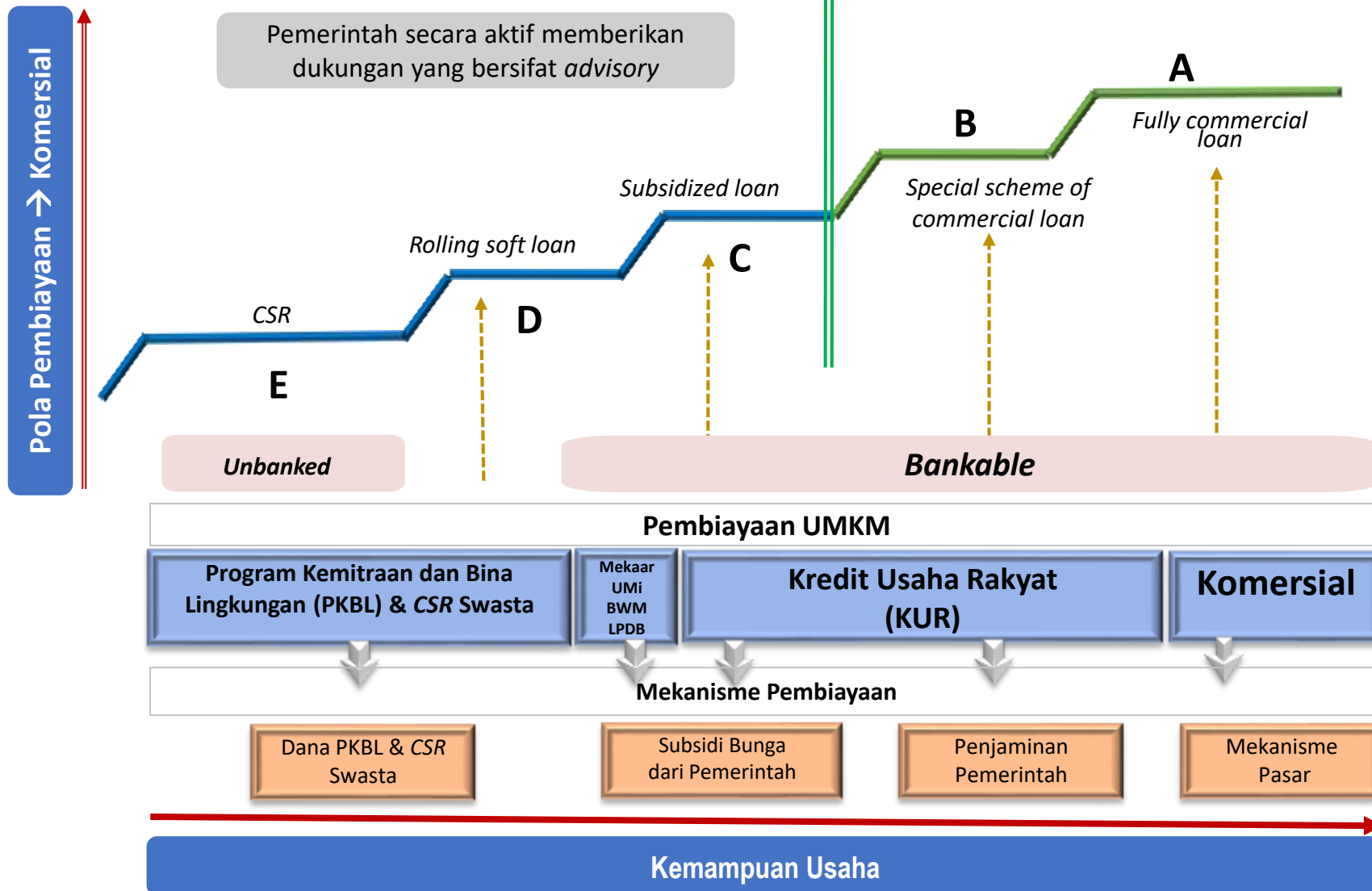
JKN (PBI)

Rastra, BPNT, dan Kartu Sembako

Subsidi Energi (LPG 3kg, Solar, Mitan)



Kedepan pembiayaan UMKM diarahkan dengan mengintegrasikan seluruh jenis pembiayaan UMKM. Usaha mikro dan kecil yang *unbankable* dibina dan dikembangkan melalui CSR dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), hingga kemudian naik kelas pada pola pembiayaan terakhir, yaitu kredit komersial.

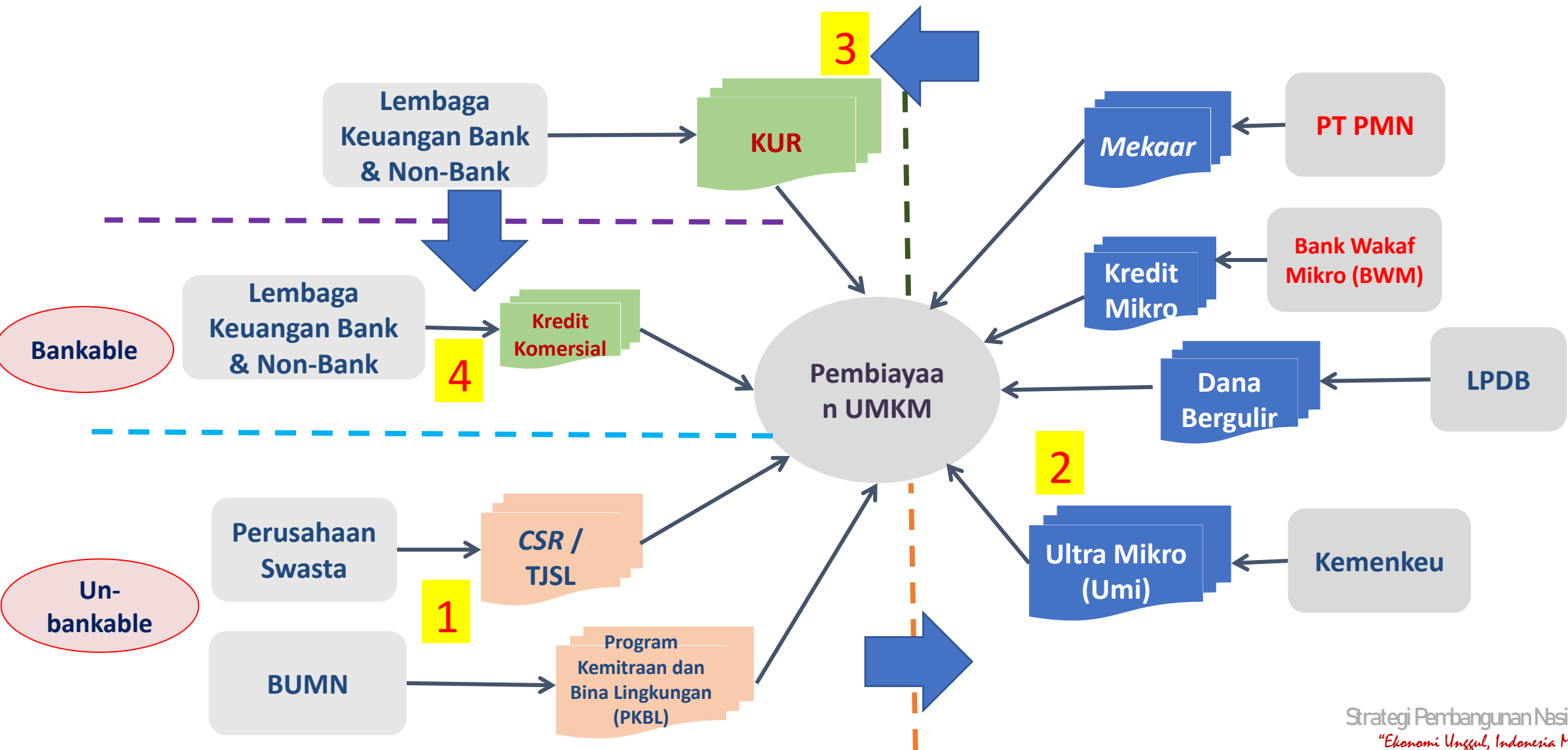


Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dari BUMN dan dana CSR dari perusahaan swasta dapat dimanfaatkan untuk penerima yang masih *un-bankable*.

Bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan akan menyesuaikan seiring dengan kemajuan usaha hingga pada akhirnya unit usaha tersebut hanya layak diberikan pembiayaan komersial.

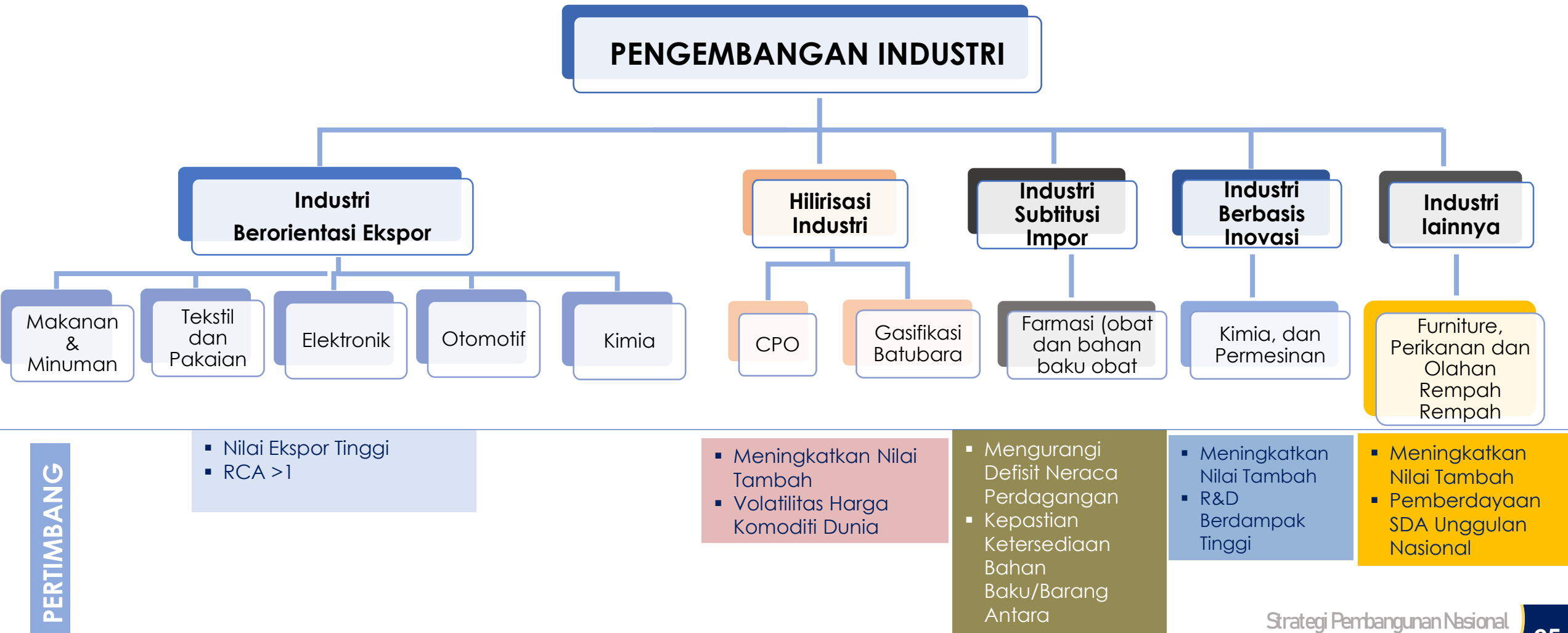


Siklus Pembiayaan UMKM berdasarkan kondisi keuangan dan usaha





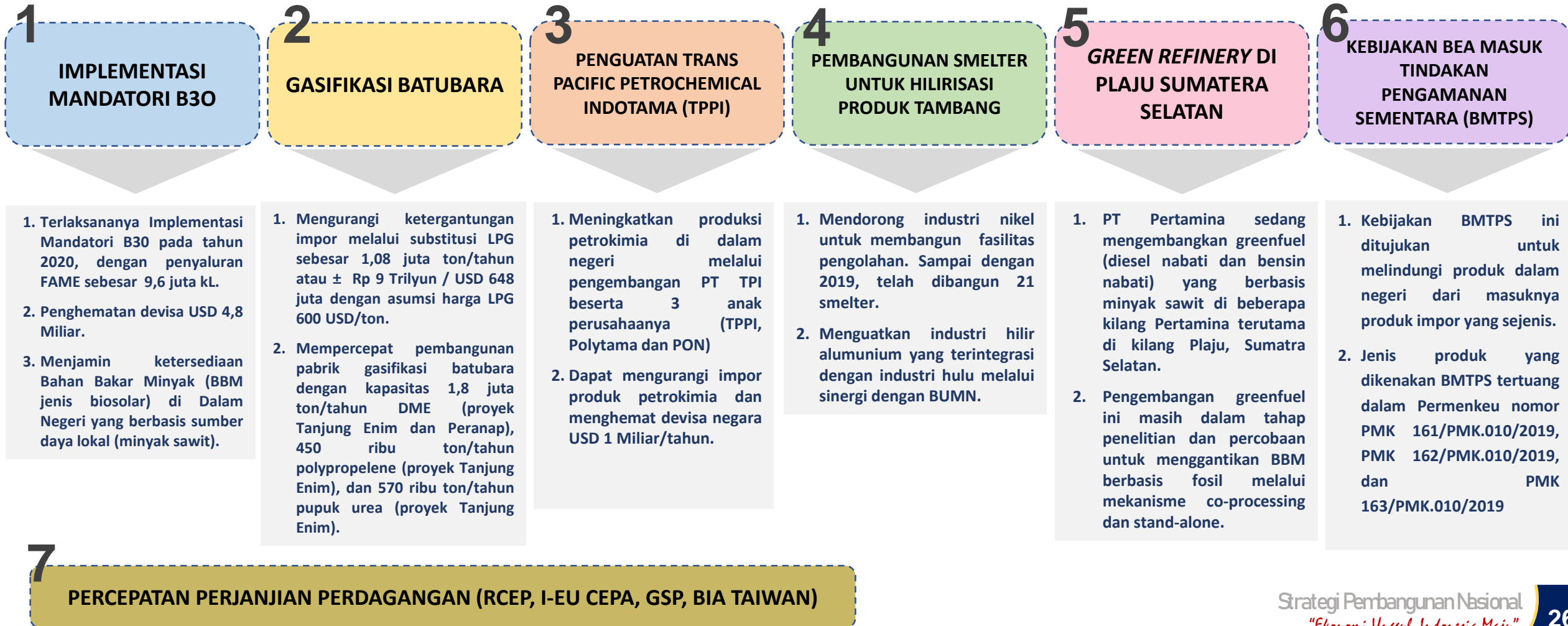
Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya dengan menyelesaikan akar permasalahan industri prioritas tersebut, seperti modernisasi permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang membutuhkan





Untuk meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca perdagangan

Program jangka pendek














ON-GOING NEGOTIATIONS AND REVIEW








- 1  **Indonesia-European Union CEPA**
 Negotiations started: 2016
 Current status: 9th Round (Des 2019); **Target: 2020**
- 2  **Indonesia-Iran PTA**
 Negotiations started: 2010
 Current status: 5th Round (Feb 2018); **Target: 2020**
- 3  **Indonesia-Turkey CEPA**
 Negotiations started: 2018
 Current status: 3rd Round TIGs (Jan 2019); **Target: 2020**
- 4  **Indonesia-Tunisia PTA**
 Negotiations started: 2018
 Current status: 3rd Round (March 2019); **Target: 2020**
- 5  **Indonesia-Pakistan TIGA (Review/Upgraded)**
 Implemented: 1 March 2019
 Current Status: 1st JNC (August 2019); **Target: 2021**
- 6  **Indonesia-Bangladesh PTA**
 Current status: 2nd Round (July 2019); **Target: 2020**
- 7  **Indonesia-Morocco PTA**
 Current status: Launch negotiation (Jun 2018); **Target: 2021**
- 8  **ASEAN Economic Community (AEC)**
 Current status: on-going review; **Target: 2025**
- 9  **ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) (Review)**
 Current status: on-going review; **Target: 2020**
- 10  **ASEAN-India FTA (AIFTA) (Review)**
 Current status: on-going review; **Target: 2020**

INDONESIA TRADE NEGOTIATIONS

IMPLEMENTED

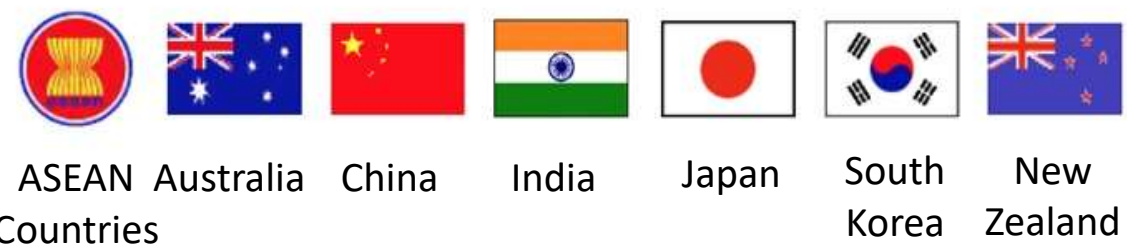
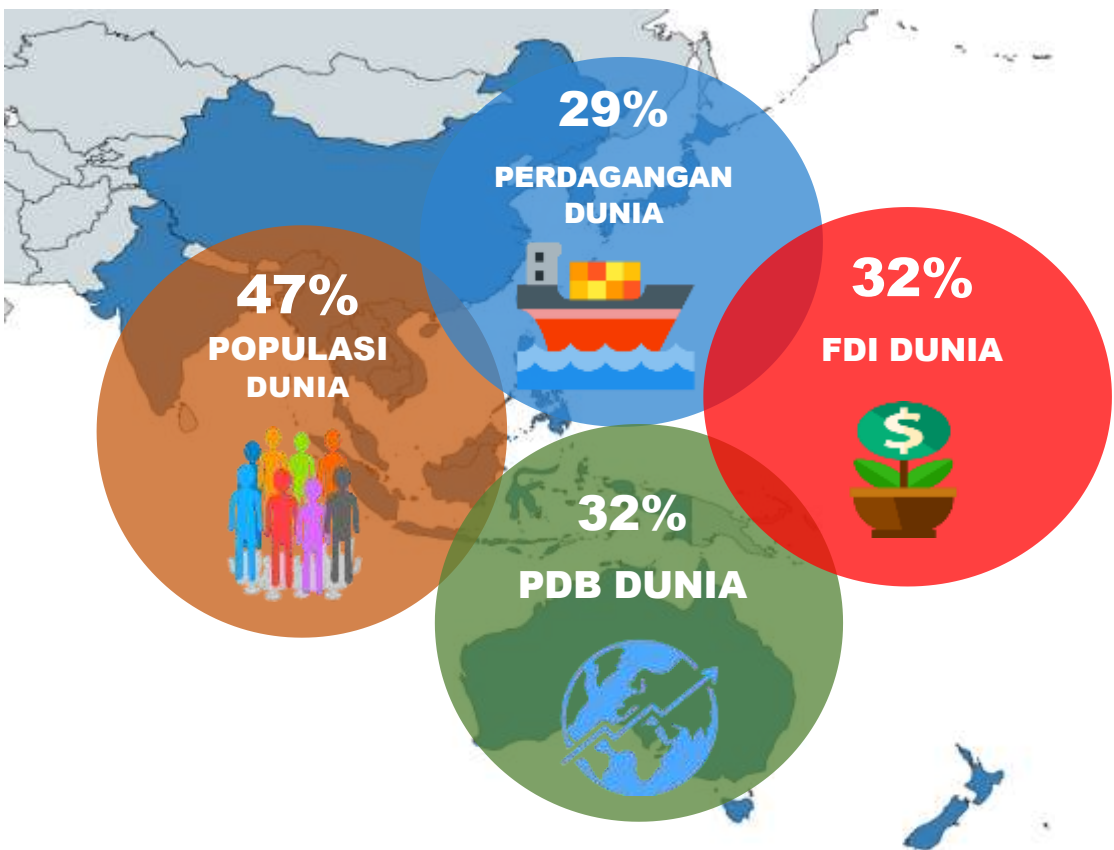
- 1  **Indonesia-Japan EPA**
 Implemented: 2008 (IJEPA)
- 2  **Indonesia-Pakistan PTA**
 Implemented: 1 March 2019
- 3  **MOU Indonesia-Palestine**
 Implemented: 21 February 2019
- 4  **ASEAN TIGA**
 Implemented: 2010
- 5  **ASEAN-China FTA**
 Implemented: 2004
- 6  **AANZFTA**
 Implemented: 2012
- 7  **ASEAN-India FTA**
 Implemented: 2010
- 8  **ASEAN-Japan CEP**
 Implemented: 2009
- 9  **ASEAN-Korea FTA**
 Implemented: 2006
- 10 **Indonesia-Chile CEPA**
 Implemented: 10 August 2019

CONCLUDED/RATIFICATION PROCESS

- 1  **Indonesia-EFTA CEPA**
 Current status: signed on 16 Dec 2018, on ratification process
- 2  **Indonesia-Australia CEPA**
 Current status: signed on 4 March 2019, on ratification process
- 3  **ASEAN-Hong Kong FTA & Investment Agreement**
 Current status: Concluded, Signed in 12 November 2017
- 4  **Indonesia-Japan EPA (Review)**
 Current status: Concluded
- 5  **Indonesia-Mozambique PTA**
 Current status: signed On 27 August 2019, on ratification process
- 6  **Indonesia-Korea CEPA**
 Current status: substantially concluded
- 7  **Regional Comprehensive Economic Partnership**
 Current status: essentially concluded
- 8  **ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)**
 Current status: signed on 11 Nov 2018, on ratification process
- 9  **ASEAN Agreement on E-Commerce**
 Current status: signed on 12 Nov 2018, on ratification process
- 10  **ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)**
 Current status: signed on 23 Apr 2019, on ratification process
- 11  **ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)**
 Current status: signed on 23 Apr 2019, on ratification process



TRANSFORMASI EKONOMI: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)



RCEP merupakan konsolidasi lebih lanjut kesepakatan FTA 10 negara ASEAN dengan 6 negara mitra FTA-nya (Cina, Korea, Jepang, India, Australia dan New Zealand). Indonesia merupakan inisiator dan negara koordinator untuk perundingan RCEP.

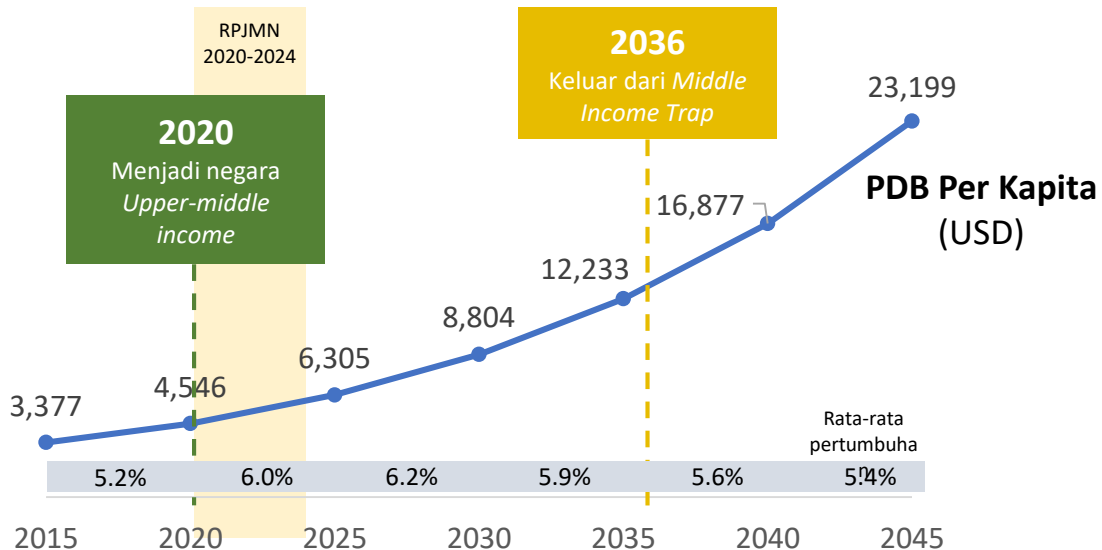
TIMELINE PROSES RCEP





TRANSFORMASI EKONOMI DIMULAI PADA TAHUN 2020-2024

- Transformasi Ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *middle income trap* di tahun 2036.
- Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7.0%.

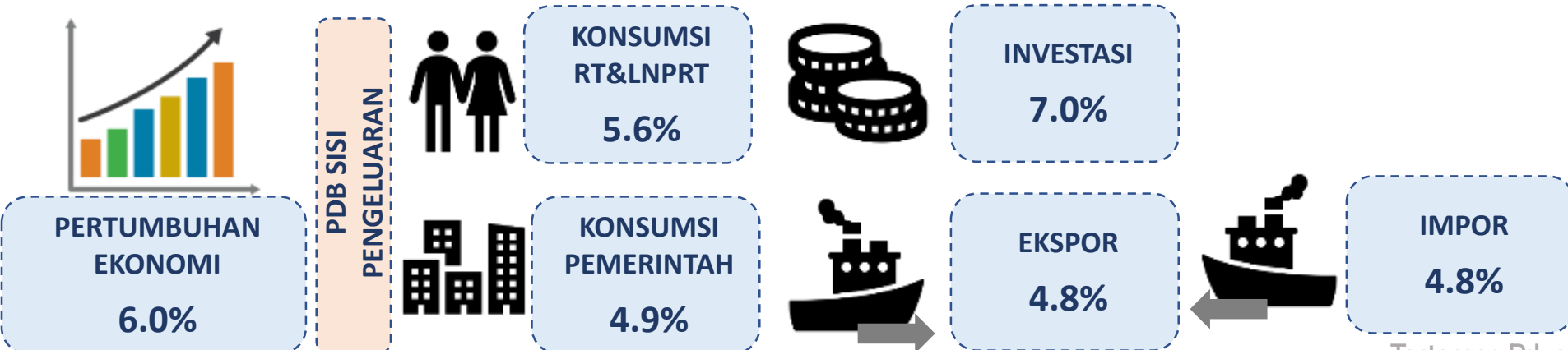


RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-2045

PDB RIIL
5.7%

PDB RIIL PER KAPITA
5.0%

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2020-2024



TARGET TAHUN 2045

NEGARA MAJU DAN PDB TERBESAR
KE-5
(USD 7,4 TRILIUN)

PERANAN KTI MENJADI
25%

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

TERIMA KASIH



@perekonomianRI



ekon.go.id



perekonomianRI

